

Analisis Determinan PAD: Belanja Modal, Mandiri Fiskal, Tingkat Kemiskinan dan PDRB per Kapita

Abid Laksa Linuwih*, Andryan Setyadharna

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang
Jl. Kolonel HR Hadijanto, Sekaran, Kec. Gunung Pati 50229, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ¹*abidlaksa@students.unnes.ac.id, ²andryan@mail.unnes.ac.id

Email Penulis Korespondensi: abidlaksa@students.unnes.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tujuh kabupaten/kota di kawasan Solo Raya selama periode 2014–2023. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian Fiskal, Tingkat Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dan teknik analisis regresi menggunakan model Fixed Effects yang telah melalui uji Chow dan uji Hausman. Untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas, digunakan metode Generalized Least Squares (GLS) dengan pendekatan Panel EGLS. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian Fiskal, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. Koefisien determinasi sebesar 91,93 persen menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD di daerah harus mempertimbangkan pembangunan infrastruktur yang efektif, penguatan kemandirian fiskal, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal yang berbasis data dan kontekstual terhadap karakteristik wilayah masing-masing.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Rasio Belanja Modal; Kemandirian Fiskal; PDRB per Kapita; Solo Raya

Abstract—This study aims to analyze the determinants of Regional Original Revenue (PAD) in seven districts/cities in the Solo Raya region during the 2014–2023 period. The independent variables in this study include the Capital Expenditure Ratio, Fiscal Independence Ratio, Poverty Rate, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita. A quantitative approach with panel data regression was applied using the Fixed Effects Model, selected based on Chow and Hausman tests. To address the heteroscedasticity issue, the Generalized Least Squares (GLS) method with a panel EGLS approach was employed. The estimation results show that the Capital Expenditure Ratio, Fiscal Independence Ratio, and GRDP per capita have a positive and significant effect on PAD, while the Poverty Rate has no significant effect. The coefficient of determination of 91.93 percent indicates that the model has a very strong explanatory power. These findings suggest that efforts to increase PAD should focus on effective infrastructure development, strengthening fiscal independence, and enhancing regional economic capacity. This research is expected to serve as a reference for local governments in formulating data-driven and region-specific fiscal strategies.

Keywords: Regional Original Revenue; Capital Expenditure; Fiscal Independence; GRDP per Capita; Solo Raya

1. PENDAHULUAN

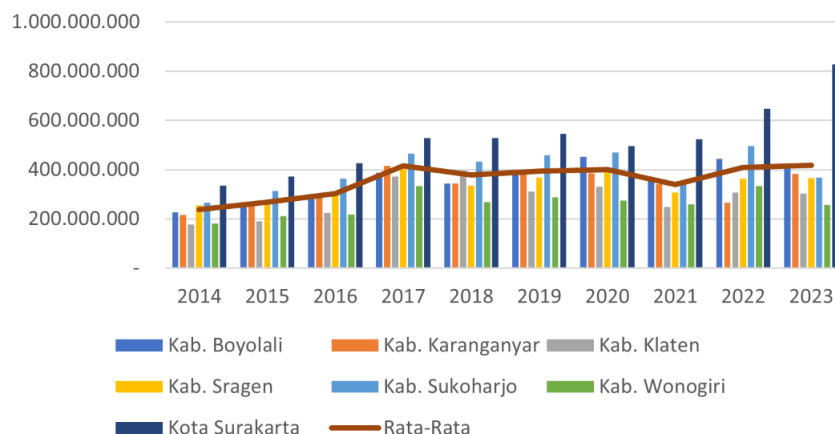
Desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia sejak dua dekade terakhir telah menjadi tonggak penting dalam mendorong kemandirian daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini didorong oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu implikasi utama dari desentralisasi fiskal adalah semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui sumber daya keuangan internal, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama kemandirian fiskal. PAD menggambarkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Wahyuni dan Ali (2024) menyatakan bahwa tingginya PAD menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merancang dan membiayai program pembangunan. Menurut Rizky dan Syahputra (2022) PAD menjadi indikator utama dalam menilai seberapa besar kapasitas fiskal suatu daerah.

Selain itu, desentralisasi fiskal menekankan bahwa di negara berkembang, pendapatan asli daerah (PAD) bukan hanya instrumen penerimaan, tetapi juga alat penting untuk memperkuat akuntabilitas, otonomi, dan kapasitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber pendapatan sendiri cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan warganya dan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyediaan layanan dan pembangunan inklusif (Rugeiyamu & Msendo, 2025). Namun, kenyataan di banyak daerah menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kusuma dan Anwar (2024) menyoroti bahwa ketergantungan ini bukan hanya disebabkan oleh rendahnya basis ekonomi, tetapi juga oleh kelemahan dalam tata kelola fiskal dan kapasitas kelembagaan daerah.

Untuk memahami dinamika kinerja fiskal di wilayah Solo Raya selama satu dekade terakhir, grafik berikut menyajikan rata-rata PAD dari masing-masing kabupaten/kota selama periode 2014–2023. Visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai kapasitas fiskal masing-masing daerah dalam kawasan.

Pada Gambar 1 menggambarkan rata-rata PAD tiap kabupaten atau kota di Wilayah Solo Raya, diawali pada tahun 2014 yang cenderung meningkat sampai pada tahun 2017 dan relatif stabil sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 inilah pengaruh COVID-19 sangat signifikan terhadap PAD di wilayah ini dan sebagian besar bersifat negatif, kemudian

rata-rata PAD menurun di tahun 2021. Hal ini dikarenakan penurunan aktivitas bisnis seperti pembatasan atau *lockdown* menyebabkan hotel, restoran, dan tempat hiburan tutup sementara atau beroperasi secara terbatas, sehingga mengakibatkan penurunan pajak (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan). Kemudian meningkat dan relatif stabil hingga 2023.



Gambar 1. Rata-rata PAD Kabupaten/Kota di Wilayah Solo Raya Tahun 2014–2023

Sumber Data: BPS Jateng (Olah Data Excel, 2025)

Selain sebagai indikator kapasitas fiskal, PAD juga mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah. Peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut penelitian oleh Kristiyanti et al. (2022), strategi peningkatan PAD yang efektif melibatkan integrasi antara tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan anggaran daerah. PAD sendiri terdiri dari komponen-komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Namun, dalam konteks peningkatan kapasitas fiskal, pendekatan yang hanya mengandalkan komponen PAD seperti pajak dan retribusi cenderung terbatas dalam menangkap faktor-faktor struktural ekonomi daerah (Fitri Wahyuni & Ali, 2024).

Tidak semua daerah mampu menunjukkan kinerja PAD yang optimal. Ketimpangan kemampuan fiskal di tingkat daerah masih menjadi persoalan yang signifikan di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Solo Raya. Kawasan ini terdiri dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Meskipun kawasan ini tergolong sebagai wilayah aglomerasi dengan interaksi ekonomi yang tinggi, terdapat ketidakseimbangan yang tajam dalam hal kontribusi PAD dan rasio kemandirian fiskal antarwilayah. Kota Surakarta memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi, sedangkan kabupaten-kabupaten lain masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa otonomi fiskal belum berjalan merata meskipun berada dalam satu kawasan strategis. Selain faktor kebijakan fiskal internal, terdapat banyak variabel lain yang secara teoritis maupun empiris dapat memengaruhi kinerja PAD suatu daerah. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa alokasi belanja modal yang tinggi dan efisien dapat mendorong peningkatan PAD karena belanja tersebut menciptakan infrastruktur publik yang menunjang aktivitas ekonomi (Wulandari & Sulistyowati, 2024). Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dasar yang tidak disediakan oleh pasar, sehingga investasi fiskal ini dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor ekonomi daerah (Nuraini & Hakim, 2021). Studi oleh Silalahi et al. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal yang efisien dan terarah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PAD, khususnya di sektor jasa dan perdagangan. Namun demikian, efektivitas belanja modal tidak hanya tergantung pada besarnya, tetapi juga pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan relevansi terhadap kebutuhan daerah. Oleh karena itu, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah sering digunakan sebagai indikator sejauh mana suatu daerah memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam kebijakan fiskalnya.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan yang tinggi dinilai dapat menurunkan penerimaan PAD karena masyarakat miskin memiliki kontribusi terbatas terhadap pajak dan retribusi (Zulfi & Wijaya, 2024). Hasil serupa juga ditemukan oleh Rhussary dan Putera (2024), yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki rasio PAD yang lebih rendah. Penelitian mereka menekankan bahwa pengurangan kemiskinan bukan hanya merupakan tujuan sosial, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat fondasi fiskal daerah secara berkelanjutan. Selain membatasi potensi penerimaan, tingkat kemiskinan juga meningkatkan tekanan pada sisi pengeluaran daerah. Pemerintah daerah cenderung harus mengalokasikan belanja sosial yang lebih besar untuk subsidi, bantuan sosial, dan layanan dasar bagi kelompok miskin. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan fiskal, terutama bagi daerah yang belum memiliki PAD yang memadai. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga merupakan hambatan struktural dalam penguatan kemandirian fiskal daerah.

Salah satu alat ukur penting dalam menganalisis kemampuan fiskal suatu daerah adalah rasio kemandirian fiskal, yang membandingkan PAD dengan total pendapatan atau jumlah dana transfer yang diterima dari pusat. Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal, semakin tinggi pula kapasitas fiskal daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara otonom. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat, yang mengindikasikan belum optimalnya potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri (Oki et al., 2020).

Rasio kemandirian fiskal sendiri juga sering digunakan sebagai ukuran kapasitas fiskal relatif, yaitu perbandingan antara PAD dan dana perimbangan (Yulis et al., 2022). Studi komparatif lintas negara menegaskan pentingnya indikator rasio dalam mengukur tingkat desentralisasi dan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Ukuran kemandirian fiskal tidak hanya dilihat dari besaran pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dari kontribusinya terhadap struktur pendapatan secara keseluruhan, termasuk dalam konteks transfer fiskal antarpemerintahan, di mana ketergantungan pada transfer pusat seringkali dapat membatasi otonomi fiskal (Stafa et al., 2024). Dalam praktiknya, kemandirian fiskal juga mencerminkan efektivitas tata kelola fiskal daerah. Daerah dengan PAD tinggi belum tentu mandiri secara fiskal jika dana transfer pusat masih mendominasi struktur pendapatannya. Oleh karena itu, PAD sebagai ukuran absolut perlu dilengkapi dengan rasio kemandirian fiskal sebagai ukuran relatif.

Pentingnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai indikator kapasitas ekonomi juga telah diakui dalam berbagai kajian. Astawa dan Budhi (2022) menemukan bahwa PDRB per kapita berkorelasi positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Denpasar. Temuan serupa diperoleh oleh Susila dan Pradhani (2022), yang menekankan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung memiliki potensi PAD yang lebih besar karena diperkuat oleh aktivitas sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, keempat variabel ini belanja modal, kemandirian fiskal, tingkat kemiskinan, dan PDRB per kapita patut dianalisis secara simultan dalam melihat determinasi PAD di suatu wilayah.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan per daerah atau lintas provinsi tanpa memperhatikan konteks kawasan yang terintegrasi secara fungsional dan kelembagaan. Penelitian yang spesifik menyoroti kawasan seperti Solo Raya sebagai entitas ekonomi yang saling terhubung masih sangat terbatas. Padahal, menurut Kusuma dan Anwar (2024), ketimpangan fiskal dalam kawasan aglomerasi seperti ini dapat menimbulkan inefisiensi kolektif dalam pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan kawasan, analisis dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana disparitas PAD berkorelasi dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda di masing-masing daerah.

Sebagai bagian dari analisis awal, dilakukan perbandingan indikator fiskal antara tiga kawasan strategis di Jawa Tengah: Solo Raya, Kedungsepur, dan Barlingmascakeb. Indikator yang digunakan meliputi rata-rata PAD, rasio kemandirian fiskal, serta ketimpangan fiskal antardaerah dalam kawasan. Detail perbandingan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kawasan Strategis di Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Fiskal (Tahun Terakhir: 2023)

Kawasan	Daerah Anggota	Rata-Rata PAD (Rp)	Rata-rata Rasio Kemandirian Fiskal (%)	Ketimpangan Antardaerah (Koefisien Variasi) (%)
Solo Raya	7 (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten)	418.359.592	25,18	68,30
Kedungsepur	6 (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi)	853.576.329	26,35	57,36
Barlingmascakeb	5 (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen)	540.085.175	17,61	23,86

Sumber Data: BPS Jateng (Olah Data Excel, 2025)

Pada Tabel 1, disajikan perbandingan antara tiga kawasan strategis Solo Raya, Kedungsepur, dan Barlingmascakeb berdasarkan rata-rata PAD per kapita, rasio kemandirian fiskal, dan koefisien variasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Solo Raya memiliki PAD per kapita yang lebih rendah dibanding Kedungsepur, kawasan ini memiliki ketimpangan fiskal internal yang paling tinggi, ditunjukkan oleh Koefisien Variasi sebesar 68,30%, jauh di atas Kedungsepur (57,36%) dan Barlingmascakeb (23,86%). Artinya, Solo Raya adalah kawasan dengan struktur fiskal yang paling tidak merata antarwilayah. Fakta ini menjadi argumen utama mengapa Solo Raya dipilih sebagai fokus analisis dalam tulisan ini, karena perbedaan kemandirian fiskal yang tajam ini belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya (Kusuma & Anwar, 2024).

Kawasan Solo Raya telah disebut secara eksplisit dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 sebagai kawasan strategis yang memiliki keterkaitan fungsional dan ekonomi. Keberadaan Forum Kerja Sama Pengembangan Wilayah Solo Raya juga menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang mendukung integrasi kebijakan pembangunan. Namun demikian, perbedaan yang mencolok dalam kinerja PAD di antara anggota kawasan menunjukkan adanya permasalahan mendasar yang belum terselesaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi pembangunan berbasis kawasan tidak dapat dilepaskan dari pemerataan kapasitas fiskal antardaerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian Fiskal, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB per kapita terhadap PAD pada tujuh kabupaten/kota di Solo Raya selama periode 2014–2023. Dengan menggunakan pendekatan data panel dan model *Fixed Effects* yang telah melalui uji Chow dan Hausman, serta koreksi heteroskedastisitas melalui metode *Generalized Least Squares* (GLS), diharapkan penelitian ini dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan dapat diandalkan secara empiris.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan wawasan berbasis data mengenai struktur determinasi PAD dalam konteks kawasan strategis. Penelitian ini juga melengkapi literatur yang ada dengan menambahkan dimensi spasial kawasan dalam pembahasan kinerja fiskal daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan fiskal yang kontekstual, serta sebagai referensi untuk memperkuat sinergi fiskal dan pembangunan antarwilayah dalam satu kawasan. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berpijak pada angka, tetapi juga mempertimbangkan struktur kelembagaan dan konteks sosial ekonomi yang melingkupinya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Desain penelitian ini menggunakan data panel (*panel data*) yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) selama 10 tahun (2014–2023) dan data lintas wilayah (*cross section*) dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Solo Raya. Wilayah Solo Raya terdiri atas Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti memperoleh estimasi parameter yang lebih akurat karena dapat mengontrol heterogenitas antarunit *cross-section*. Selain itu, data panel memberikan jumlah observasi yang lebih banyak dibandingkan data *time series* atau *cross section* saja, yang dalam konteks penelitian ini terdiri dari 7 daerah \times 10 tahun = 70 observasi. Penelitian dilakukan dalam bentuk *desk study* menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota, serta publikasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

2.2 Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen, dengan definisi operasional sebagai berikut pada Tabel 2:

Tabel 2. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Simbol	Satuan	Definisi Operasional
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Miliar Rupiah	Jumlah seluruh penerimaan PAD (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain) di tiap daerah per tahun.
Rasio Belanja Modal	RBM	Persentase (%)	Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah di tiap daerah dalam satu tahun anggaran.
Rasio Kemandirian Fiskal	RMK	Persentase (%)	Perbandingan PAD terhadap dana perimbangan di tiap daerah per tahun.
Tingkat Kemiskinan	TK	Persentase (%)	Persentase penduduk miskin dari total populasi di tiap daerah per tahun.
PDRB per Kapita	PDRB	Juta Rupiah	PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk, mencerminkan pendapatan rata-rata Masyarakat di tiap daerah per tahun.

Semua data diolah dalam bentuk tahunan dan dinyatakan dalam satuan yang seragam agar dapat dibandingkan antarwilayah dan antarperiode.

2.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Regresi data panel dipilih karena mampu menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan unit (*cross section*) sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap dan efisien (Baltagi, 2021). Sebelum model diestimasi, dilakukan serangkaian uji untuk menentukan bentuk spesifikasi model panel yang paling sesuai, yaitu melalui uji Chow untuk memilih antara model *common effect* dan *fixed effect*, serta uji Hausman untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect* (Baltagi, 2021). Setelah model awal ditentukan, dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik seperti normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap asumsi klasik, khususnya heteroskedastisitas, maka model diestimasi ulang menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) melalui pendekatan Panel EGLS dengan *cross-section weight*, untuk menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias (Baltagi, 2021). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$LOG_PAD_{it} = \alpha + \beta_1RBM_{it} + \beta_2RMK_{it} + \beta_3TK_{it} + \beta_4LOG_PDRB_{it} + \epsilon_{it} \tag{1}$$

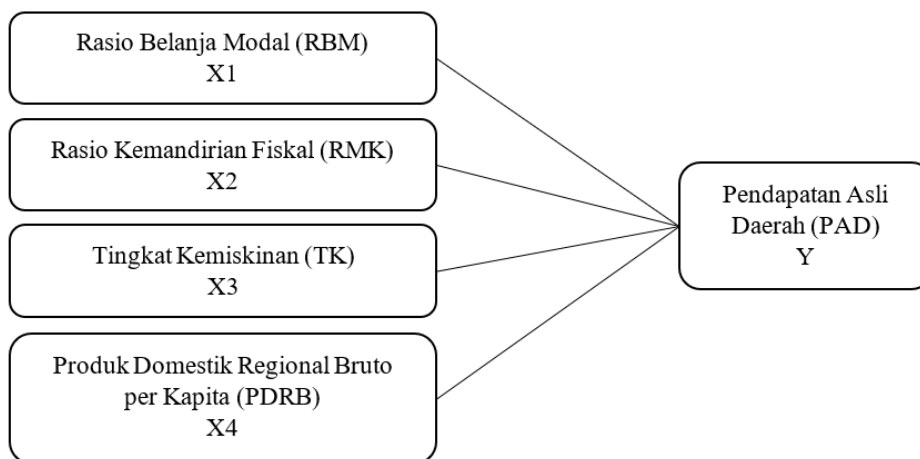
Dalam penelitian ini, LOG_PAD digunakan sebagai variabel dependen yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk logaritma. Variabel independennya terdiri dari RBM, yaitu Rasio Belanja Modal yang menunjukkan perbandingan belanja modal terhadap total belanja daerah; RMK, yaitu Rasio Kemandirian Fiskal yang dihitung dari PAD dibandingkan dengan dana perimbangan; TK, yaitu Tingkat Kemiskinan; serta LOG_PDRB, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam bentuk logaritma. Penelitian ini menggunakan data panel, yang berarti mengamati beberapa kabupaten/kota (i) selama periode waktu tertentu (t), yaitu dari tahun 2014 sampai 2023. Dalam model yang digunakan, α adalah konstanta, β_1 sampai β_4 adalah koefisien dari masing-masing variabel independen, dan ϵ adalah error term atau gangguan yang mewakili faktor lain di luar model.

2.4 Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave (1989). Dalam teori ini, fungsi utama pemerintah dalam sistem ekonomi terdiri atas tiga pilar: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Romer, 2022). Ketiganya menjadi kerangka dasar dalam memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan kinerja keuangan daerah, termasuk PAD. Fungsi alokasi menjelaskan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik, yang dalam konteks daerah tercermin dari belanja modal. Rasio belanja modal mencerminkan proporsi pengeluaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset produktif jangka panjang. Belanja semacam ini diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan meningkatkan PAD secara berkelanjutan (Wulandari & Sulistyowati, 2024).

Fungsi distribusi menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kesejahteraan. Dalam hal ini, tingkat kemiskinan merepresentasikan salah satu hambatan struktural bagi optimalisasi pendapatan daerah. Daerah dengan angka kemiskinan tinggi umumnya memiliki keterbatasan dalam potensi pajak dan retribusi, serta menuntut belanja sosial yang lebih besar (Zulfi & Wijaya, 2024). Sementara itu, fungsi stabilisasi mengacu pada kemampuan fiskal untuk menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Dalam tulisan ini, rasio kemandirian fiskal digunakan untuk melihat sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan belanja tanpa ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat. Bersama dengan PDRB per kapita sebagai indikator kapasitas ekonomi, kedua variabel tersebut berfungsi mengukur kekuatan fiskal daerah dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang (Yulis et al., 2022).

Secara keseluruhan, teori keuangan publik Musgrave menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan efisiensi, keadilan, dan stabilitas ekonomi. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan perlu dijalankan secara seimbang agar kebijakan fiskal yang diterapkan dapat memberikan dampak positif yang menyeluruh bagi masyarakat dan perekonomian khususnya pada suatu daerah. Berikut ini merupakan kerangka teori penelitiannya.



Gambar 2. Kerangka Teori Penelitian

Pada Gambar 2 ini penelitian memfokuskan pada analisis pengaruh empat variabel independen terhadap kinerja PAD di kawasan Solo Raya. Keempat variabel tersebut adalah Rasio Belanja Modal (X1), Rasio Kemandirian Fiskal (X2), Tingkat Kemiskinan (X3), dan PDRB per kapita (X4). Adapun PAD sebagai variabel dependen (Y) merepresentasikan kinerja penerimaan daerah yang menjadi target utama dalam kajian ini. Hubungan antara variabel-variabel tersebut selanjutnya digambarkan dalam kerangka berpikir berikut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif meliputi nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Hasil pengolahan data statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Tabel Statistik Deskriptif

	LOG PAD	RBM	RMK	TK	LOG PDRB
<i>Mean</i>	26.55393	15.31736	27.16326	11.23429	17.02949
<i>Median</i>	26.56110	15.32950	23.89930	10.94500	17.03724
<i>Max</i>	27.44293	27.35352	62.80427	14.89000	17.51978
<i>Min</i>	25.90461	5.260663	11.70529	7.140000	16.59481
<i>Std. Dev.</i>	0.298518	4.708152	10.85236	2.086159	0.199283
N	70	70	70	70	70

Berdasarkan Tabel 3 Statistik Deskriptif, seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu LOG_PAD, RBM, RMK, TK, dan LOG_PDRB. Masing-masing variabel disajikan dengan nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum dan minimum, standar deviasi, serta jumlah observasi. Variabel LOG_PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 26,55 dengan nilai minimum 25,90 dan maksimum 27,44. Standar deviasi sebesar 0,30 menunjukkan bahwa data LOG_PAD relatif stabil dan tidak menyebar terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Variabel RBM memiliki nilai rata-rata sebesar 15,32 dengan nilai maksimum 27,35 dan minimum 5,26. Standar deviasi sebesar 4,71 menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi antar observasi dalam alokasi belanja modal daerah. Variabel RMK menunjukkan nilai rata-rata sebesar 27,16 dengan sebaran yang cukup lebar, yaitu antara 11,71 hingga 62,80. Nilai standar deviasi sebesar 10,85 mendukung adanya ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah dalam kawasan Solo Raya. Sementara itu, variabel TK memiliki rata-rata sebesar 11,23 dan standar deviasi sebesar 2,09. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di kawasan Solo Raya memiliki penyebaran yang sedang. Nilai minimum sebesar 7,14 dan maksimum sebesar 14,89 menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan yang nyata antar wilayah. Adapun LOG_PDRB memiliki nilai rata-rata sebesar 17,03, dengan minimum 16,59 dan maksimum 17,52. Standar deviasi sebesar 0,20 mengindikasikan bahwa variabel logaritma PDRB per kapita relatif homogen di antara daerah-daerah dalam kawasan Solo Raya. Seluruh variabel memiliki jumlah observasi sebanyak 70, yang merupakan hasil kombinasi data panel dari tujuh kabupaten/kota di kawasan Solo Raya selama periode 10 tahun (2014-2023).

3.2 Uji Chow dan Hausman

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui dua tahap uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 4. Uji Chow dan Hausman

	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	0.0000

Pada Tabel 4 hasil uji Chow menunjukkan nilai *Prob. F-statistic* sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, model *Fixed Effect* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect* (CEM), karena mampu menangkap efek individual antar kabupaten/kota secara lebih akurat. Selanjutnya, dilakukan uji Hausman untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil uji menunjukkan *Prob. Chi-Square* sebesar 0,0000, yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, model *Fixed Effect* dinyatakan sebagai model terbaik dalam penelitian ini, karena mampu menangkap heterogenitas yang tidak dapat dijelaskan oleh *Random Effect*.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik dilakukan untuk memastikan validitas hasil estimasi. Empat asumsi utama yang diuji adalah heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan normalitas residual.

3.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah varians residual model bersifat konstan (homoskedastis).

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

	P > t
RBM	0,000
RMK	0,000
TK	0,175
LOG_PDRB	0,312
C	0,210

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5, ditemukan gejala heteroskedastisitas pada dua variabel independen, yaitu Rasio Belanja Modal (RBM) dan Rasio Kemandirian Fiskal (RMK), yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0,000 yang signifikan pada uji Glejser. Oleh karena itu, digunakan metode estimasi alternatif untuk memperbaiki model.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dengan metode *Pair Wise Correlation* dengan nilai ketentuan nilai koefisien korelasi < 0,80, maka terbebas dari multikolinearitas (Mentari & Indriani, 2024).

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	RBM	RMK	TK	LOG PDRB
RBM	1.000000	0.384113	-0.224052	-0.052363
RMK	0.384113	1.000000	-0.562391	0.583070
TK	-0.224052	-0.562391	1.000000	-0.412360
LOG PDRB	-0.052363	0.583070	-0.412360	1.000000

Pada Tabel 6 koefisien korelasi antara Rasio Belanja Modal dan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar $0,384113 < 0,8$. Rasio Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan sebesar $-0,224052 < 0,8$. Rasio Belanja Modal dan PDRB sebesar $-0,052363 < 0,8$. Rasio kemandirian Fiskal dan Tingkat Kemiskinan sebesar $-0,562391 < 0,8$. Rasio kemandirian Fiskal dan PDRB sebesar $0,583070 < 0,8$. Tingkat Kemiskinan dan PDRB sebesar $-0,412360 < 0,8$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini terbebas dari multikolinearitas.

3.3.3 Uji Autokorelasi

Statistik *Durbin-Watson* (DW) adalah uji autokorelasi dalam residual dari model statistik atau analisis regresi. Statistik *Durbin-Watson* akan selalu memiliki nilai berkisar antara 0 dan 4. Aturan praktisnya adalah bahwa nilai statistik uji DW dalam kisaran 1,5 hingga 2,5 relatif normal.

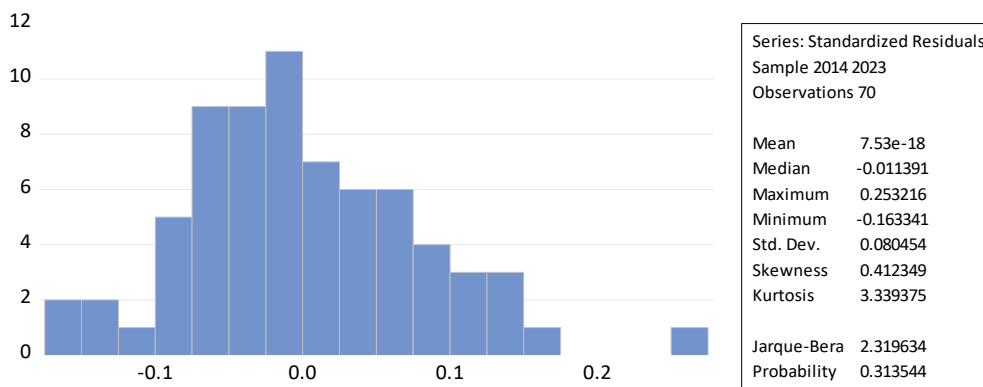
Tabel 7. Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson Statistic</i>	2.173525
--------------------------------	----------

Pada Tabel 7 uji autokorelasi menggunakan nilai *Durbin-Watson* (DW) menghasilkan angka sebesar 2,173525, yang mendekati nilai ideal 2. Hal ini mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi yang signifikan dalam model regresi, sehingga tidak diperlukan penyesuaian tambahan.

3.3.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas Residual dilakukan dengan melihat nilai Jarque-Bera



Gambar 3. Uji Normalitas

Pada Gambar 3, hasil uji normalitas nilai Jarque-Bera sebesar 2,319634, dengan probabilitas di atas 0,05. Dengan demikian, residual dinyatakan terdistribusi normal, dan model dianggap memenuhi asumsi normalitas residual. Karena gejala heteroskedastisitas ditemukan pada sebagian variabel, maka estimasi model dilakukan ulang menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) melalui Panel EGLS (*Cross-section Weighted*). Teknik ini menghasilkan parameter yang efisien dan tidak bias dalam kondisi pelanggaran asumsi klasik.

3.4 Hasil Regresi dan Interpretasi

Setelah dilakukan estimasi menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan koreksi heteroskedastisitas melalui metode *Generalized Least Squares* (GLS) berbasis Panel EGLS, diperoleh hasil regresi seperti pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi GLS (Panel GLS)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.289175	2.653924	0.485762	0.6289
RBM	0.012220	0.002923	4.181308	0.0001
RMK	0.031521	0.002333	13.50944	0.0000
TK	0.021966	0.017243	1.273966	0.2077

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG_PDRB	1.407828	0.144583	9.737140	0.0000
Adjusted R ²		0,919363		
F-statistic		79,66824		
Prob.		0,0000		

Interpretasi dari hasil estimasi regresi GLS pada Tabel 8 adalah sebagai berikut:

Nilai konstanta (C) sebesar 1,289175 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu Rasio Belanja Modal (RBM), Rasio Kemandirian Fiskal (RMK), Tingkat Kemiskinan (TK), dan logaritma Produk Domestik Regional Bruto (LOG_PDRB), bernilai nol, maka nilai dasar logaritma dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar 1,2892. Namun, dalam konteks ekonomi riil, kondisi di mana seluruh variabel bernilai nol tidaklah realistis. Oleh karena itu, konstanta dalam model regresi ini lebih berfungsi sebagai titik potong (*intercept*) antara garis regresi dengan sumbu vertikal dan tidak memiliki interpretasi ekonomi yang signifikan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal (RBM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Koefisien sebesar 0,012220 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada RBM akan meningkatkan PAD sebesar 1,22%, *ceteris paribus*. Signifikansi yang sangat kuat ($p = 0,0001$) menegaskan bahwa belanja modal menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan asli daerah. Secara teoritis, belanja modal merupakan bagian dari fungsi alokasi dalam teori keuangan public (Musgrave, 1989), yaitu upaya pemerintah menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi. Ketika belanja modal diarahkan pada pembangunan sarana produktif seperti pasar, jalan, irigasi, dan pusat pertumbuhan ekonomi maka potensi aktivitas ekonomi daerah akan meningkat. Dalam jangka menengah, peningkatan tersebut akan memperluas basis pajak dan retribusi, yang pada akhirnya meningkatkan PAD. Temuan ini konsisten dengan studi Wulandari dan Sulistyowati (2024), yang menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas belanja modal berkorelasi positif terhadap kinerja PAD. Namun demikian, efektivitas belanja modal tidak hanya bergantung pada besarnya, tetapi juga pada efisiensi perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dan sektor usaha.

Selain itu, Rasio Kemandirian Fiskal (RMK) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan koefisien sebesar 0,031521. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian fiskal sebesar 1% mampu meningkatkan PAD sebesar 3,15%, menunjukkan efek yang kuat dan stabil. Ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula PAD yang dapat dihimpun oleh daerah tersebut. RMK mencerminkan seberapa besar kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya dari sumber pendapatan sendiri. Ketika daerah memiliki kemandirian fiskal tinggi, mereka terdorong untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, melakukan reformasi pajak daerah, dan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer pusat. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan otonomi daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Yulis et al., 2022), yang menekankan bahwa RMK merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana semangat desentralisasi fiskal benar-benar berjalan. Di kawasan Solo Raya, daerah dengan RMK yang tinggi seperti Kota Surakarta dan Karanganyar juga menunjukkan capaian PAD yang relatif besar dibanding daerah lainnya.

Berbeda dengan dua variable sebelumnya, Tingkat Kemiskinan (TK) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,021966, namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,2077$). Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis kemiskinan berdampak negatif terhadap PAD, dalam konteks Solo Raya hubungan tersebut tidak cukup kuat. Ada kemungkinan faktor lain menengahi hubungan ini, seperti adanya dana transfer dan bantuan sosial yang membuat PAD tetap tumbuh meskipun kemiskinan tinggi. Secara teoritis, kemiskinan seharusnya berdampak negatif terhadap PAD karena penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah dan kontribusi fiskal yang terbatas. Namun, dalam konteks Solo Raya, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Ada beberapa kemungkinan penjelasan terhadap fenomena ini. Pertama, transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, atau bantuan sosial, tetap membuat daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetap mampu membiayai pembangunan dan memungut PAD secara nominal. Kedua, aktivitas ekonomi informal di wilayah ini relatif tinggi dan tidak sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan resmi. Ketiga, program bantuan dan intervensi sosial dari pemerintah mampu menjaga konsumsi dasar masyarakat, sehingga dampak kemiskinan terhadap penerimaan daerah tidak langsung terasa. Temuan ini berbeda dengan studi Zulfi dan Wijaya (2024) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara kemiskinan dan PAD di wilayah lain. Oleh karena itu, dalam konteks Solo Raya, hubungan antara kemiskinan dan PAD masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel antara (*intervening*) seperti daya saing ekonomi daerah dan efektivitas tata kelola fiskal.

Sementara itu untuk PDRB per Kapita (logaritmik) memiliki koefisien sebesar 1,407828 dan signifikan tinggi ($p = 0,0000$). Artinya, peningkatan 1% dalam log PDRB per kapita akan meningkatkan PAD sebesar 1,41%. Ini menunjukkan bahwa daya beli dan kapasitas ekonomi masyarakat secara langsung mendorong peningkatan penerimaan daerah. PDRB per kapita mencerminkan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat. Ketika nilai tambah sektor-sektor ekonomi meningkat dan pendapatan masyarakat naik, maka daya beli meningkat, aktivitas usaha tumbuh, dan kebutuhan terhadap layanan publik yang dikenakan retribusi juga meningkat. Selain itu, daerah dengan PDRB tinggi biasanya memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat dan basis fiskal yang lebih luas. Temuan ini memperkuat hasil studi Astawa dan Budhi (2022), serta Susila dan Pradhani (2022), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan PAD secara struktural. Oleh karena itu, PDRB tidak hanya menjadi indikator makroekonomi, tetapi juga instrumen strategis dalam merancang kebijakan fiskal daerah.

Secara simultan, hasil pengujian menunjukkan bahwa keempat variabel independen, yaitu RBM, RMK, TK, dan LOG_PDRB, berpengaruh signifikan terhadap PAD di wilayah Solo Raya selama periode 2014–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-statistic sebesar 79,66824 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0,0000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas yang kuat dalam menjelaskan hubungan simultan antara variabel-variabel independen terhadap PAD. Adapun untuk nilai *Adjusted R²* sebesar 0.919363 berarti 91,9363 persen dari variasi variabel PAD (Y) mampu dijelaskan oleh variasi himpunan variabel RBM (X1), RMK (X2), TK (X3), dan PDRB (X4). Sedangkan sisanya 8,0637 persen (100 – 91,9363) dijelaskan melalui variasi himpunan variabel di luar model. Nilai *R²* dapat berubah sesuai dengan bertambah atau berkurangnya satu variabel bebas dalam model regresi (Hutagalung & Darnius, 2022).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian Fiskal, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB per kapita terhadap PAD pada tujuh kabupaten/kota di kawasan Solo Raya selama periode 2014–2023. Dengan menggunakan pendekatan data panel dan metode estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) yang telah dikoreksi menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) karena adanya gejala heteroskedastisitas pada sebagian variabel, penelitian ini menghasilkan temuan yang cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik maupun teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel, yaitu Rasio Belanja Modal, Rasio Kemandirian Fiskal, dan PDRB per kapita, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini mempertegas pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan pembangunan ekonomi daerah sebagai prasyarat dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel Tingkat Kemiskinan menunjukkan arah pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kemiskinan memiliki konsekuensi terhadap ekonomi daerah, dampaknya terhadap PAD belum tampak secara langsung atau mungkin tertutup oleh faktor intervensi fiskal pusat dan kekuatan sektor informal. Secara keseluruhan, model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya jelaskan yang sangat tinggi, tercermin dari nilai *Adjusted R²* sebesar 91,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi PAD antar daerah di Solo Raya. Penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya dalam literatur fiskal daerah, namun sekaligus menghadirkan nilai tambah melalui pendekatan kawasan dan penggunaan metode estimasi yang robust. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menyiratkan bahwa strategi peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari perencanaan belanja modal yang produktif, penguatan sistem pemungutan dan pengelolaan PAD, serta pengembangan sektor ekonomi daerah yang berdaya saing. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah di Solo Raya untuk membangun sinergi lintas wilayah dalam konteks aglomerasi ekonomi, guna mengurangi ketimpangan fiskal dan menciptakan basis penerimaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan variabel yang digunakan, di mana aspek kelembagaan, efisiensi birokrasi, serta dimensi spasial belum diikutsertakan dalam model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel, menggunakan pendekatan spasial ekonometrik, atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika PAD dalam konteks otonomi daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- Astawa, I. G. N., & Budhi, M. K. S. (2022). PENGARUH PDRB PER KAPITA, JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA, INFLASI TERHADAP PAD KOTA DENPASAR. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(11), 4101–4112. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i11.p06>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Fitri Wahyuni, & Ali, H. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(3), 583–593. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3.2030>
- Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus : IPM Sumatera Utara Periode 2014 – 2020). *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422>
- Kristiyanti, L., Cahyani, N. M., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–11. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/2949>
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14>
- Mentari, C., & Indriani, E. (2024). Deteksi Fraudulent Financial Statement melalui Dechow F-Score dengan Pemoderasi Firm Size. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4436–4448. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2361>
- Nuraini, S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dana alokasi khusus dan pendapatan

- anggaran daerah terhadap belanja modal di Provinsi Banten (2015-2018). *Jurnal Dinamika UMT*, 6(1), 45–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/dinamika.v6i1.10222>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/1004>
- Rhussary, L., & Putera, F. (2024). Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Daerah*, 12(1), 22–34. <https://cendikia.ikipgrikaltim.ac.id/index.php/cendikia/article/view/121-134>
- Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
- Romer, C. D. (2022). Lessons from Fiscal Policy in the Pandemic: The ODE Distinguished Economist Award Lecture. *American Economist*, 67(2), 164–182. <https://doi.org/10.1177/05694345221104978>
- Rugeiyamu, R., & Msendo, A. (2025). Success, challenges and prospects of decentralization in Africa: a systematic review. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2458700>
- Silalahi, S. K., Arief, M., & Indrafana, I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24407–24419. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10470>
- Stafa, E., Prorok, T., & Elezi, S. (2024). *Fiscal decentralization indicators for South-East Europe* (9th ed.). Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe (NALAS).
- Susila, M. R., & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Pdrb Per Kapita Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(1), 72–87. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i1.4996>
- Wulandari, S. W., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Internet Financial Reporting Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Urnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(3), 215–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jieap.v1i3.397>
- Yulis, D. Y. M., Kornita, S. E., & Widayatsari, A. (2022). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, 16(2), 22–54. <https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3787>
- Zulfi, M. R., & Wijaya, S. (2024). Factors Affecting The Local Taxes Revenue By Provincial Governments In Indonesia. *Educoretax*, 4(1), 116–125. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i1.718>